

Kesimpulan

Dalam tata kelola suatu objek wisata penting untuk melibatkan pelaku wisata, tidak hanya wisatawan tetapi juga melibatkan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Masing-masing dari unsur tersebut tidak dapat berjalan sendiri. Hal ini beresiko baik, dari sisi perencanaan yang kurang matang maupun pengorganisasian yang hanya didominasi oleh satu kelompok. Dampaknya, tingkat pengawasan dalam pengelolaan menjadi minim. Hal ini mendorong, kurangnya transparansi terhadap pemerataan distribusi anggaran. Hal-hal seperti ini yang kemudian memicu konflik perebutan sumber daya, dimana anggaran tidak dapat terdistribusi secara merata.

Seperti yang terjadi di Objek Wisata Hutan Mangrove Desa Ayah, dimana pengelolaannya tidak melibatkan unsur lain diluar kelompok masyarakat. Sehingga memicu perselisihan perihal tidak meratanya sumber daya yang hanya dinikmati oleh satu kelompok yaitu KTH Pansela. Terlebih kondisi perekonomian masyarakat Desa yang didominasi oleh wiraswasta, dimana penghasilannya tidak tetap, tergantung kreativitas dari individu itu sendiri. Bahkan angka pengangguran di desa tersebut tinggi yaitu 20.23% dari jumlah penduduk Desa Ayah. Hal-hal tersebut yang semakin mendorong konflik perebutan sumber daya pun terjadi di Objek Wisata Hutan Mangrove Desa Ayah. Ketika muncul potensi sumber daya ekonomi ditengah kondisi kelangkaan sumber daya ekonomi di desa tersebut maka, konflik perebutan sumber daya tidak dapat terelakan.

Dengan adanya penyelesaian konflik melalui mekanisme *collaborative governance* menunjukkan bahwa forum kolaborasi KEE LBM Muara Kali Ijo dapat menjadi sarana kerja sama. Lebih dari itu, juga membangun sinergitas yang melibatkan unsur-unsur dari pihak pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat. Selain itu, juga mendorong sumber daya yang terbatas agar terdistrbusi secara merata dan adil kepada setiap unsur yang terlibat dan berkontribusi secara

aktif di dalam hubungan tersebut. Dengan demikian, permasalahan tidak meratanya sumber daya yang terbatas dapat terdistribusi secara merata. Salah satunya dengan melalui penetapan status Hutan Mangrove di Desa Ayah yang dikelola dalam forum kolaborasi KEE LBM Muara Kali Ijo.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan studi yang sempit mengenai *collaborative governance*, sehingga tidak semua prinsip dalam kolaborasi dieksplorasi lebih mendalam. Oleh karena itu, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah lebih mengeksplorasi studi tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata dan penerapannya di lokasi yang berbeda. Penelitian juga disarankan untuk menganalisis jangka panjang dari penerapan prinsip-prinsip *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata. Dengan demikian, diharapkan hasil yang diperoleh lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata.